2024

LAPORAN KEUANGAN

- UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 *(UNAUDITED)*

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA 05

JL. PEREMPATAN RINGROAD TIMUR BANGUNTAPAN, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 21 Februari 2025
Sekretaris,

Paija
Mayor Chk

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI. Lampiran dan Daftar	39

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Ketandan Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon Staff: (0274) 452220 Fax: (0274) 452254
www.dilmil-yogyakarta.go.id , dilmil211yogyakarta@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Satker 663293 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 21 Februari 2025
Sekretaris,

Paija
Mayor Chk

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp92.411.000 atau mencapai 99,34 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp93.972.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp370.000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp370.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp370.000

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp105.237.898 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(105.237.898) Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO

sebesar Rp(105.237.898).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp4.207.100, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(105.237.898) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp101.400.798 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp370.000

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (663293)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN TAHUN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024		% thd Angg	2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**-**	**-**
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	93.972.000	92.411.000	98,34	82.891.800
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		**93.972.000**	**92.411.000**	**98,34**	**82.891.800**
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		**-**	**-**	**0,00**	**-**
JUMLAH BELANJA		**93.972.000**	**92.411.000**	**98,34**	**82.891.800**

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (663293)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN TAHUN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNBP	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	370.000	4.207.100
Jumlah Aset Lancar		370.000	4.207.100
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**370.000**	**4.207.100**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	370.000	4.207.100
JUMLAH EKUITAS		370.000	4.207.100
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**370.000**	**4.207.100**

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (663293)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	40.376.898	41.601.625
Beban Barang dan Jasa	D.4	13.371.000	9.431.800
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	51.490.000	45.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		**105.237.898**	**96.033.425**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		**(105.237.898)**	**(96.033.425)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persedian		-	-
Beban penyesuaian Nilai Persedian		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(105.237.898)**	**(96.033.425)**
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(105.237.898)**	**(96.033.425)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (663293)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	4.207.100	300.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(105.237.898)	(96.033.425)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		-	-
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALU	E.7	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	101.400.798	99.940.525
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.837.100)	3.907.100
EKUITAS AKHIR	**E.9**	**370.000**	**4.207.100**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 dan berkendudukan di Jl. Mojopahit Ring Road Timur Banguntapan Yogyakarta. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pengadilan tingkat Pertama yang mempunyai Visi yaitu "**TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA YANG AGUNG**" serta Misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer II-11 Yka.
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Militer II-11 Yka.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Tercapainya azas Peradilan yang sederhana , cepat dan biaya murah
2. Terciptanya pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan.
3. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hukum yang tegas dengan skala prioritas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat.
4. Terpenuhinya infrastruktur dan supra guna penunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap system pelayanan public yang adil, transparan, akuntabilitas serta kopabel dalam rangka pelaksanaan penegakkan hukum yang berpihak kepada masyarakat (rakyat) pencari keadilan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp.0,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak memiliki pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TAHUN 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	-

Realisasi Pendapatan Jasa 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sebesar 0.00 % persen dibandingkan Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendapatan (jasa) di Pengadilan Militer yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak mengalami kenaikan.

Realisasi Belanja Negara Rp92.411.000

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp92.411.000 atau 98,34% dari anggaran belanja sebesar Rp. 93.972.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun 2024

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	93.972.000	92.411.000	98,34
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	93.972.000	92.411.000	98,34

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 3%. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	92.411.000	82.891.800	11%
Belanja Modal	-	-	0%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0%

Jumlah	92.411.000	82.891.800	11%

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	-	-	-
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Barang Rp92.411.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp92.411.000 dan Rp82.901.800. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11% dari Realisasi TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	5.110.000	3.776.500	35%
Belanja Barang Non Operasional	7.141.000	5.665.300	26%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27.550.000	28.460.000	-3%
Belanja Jasa	1.120.000	0	0%
Belanja Pemeliharaan	0	0	0%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	51.490.000	45.000.000	14%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0%
			0%
Jumlah Belanja Kotor	**92.411.000**	**82.901.800**	11%
Pengembalian Belanja	0	0	0%
Jumlah Belanja	**92.411.000**	**82.901.800**	11%

Belanja Bantuan Sosial Rp.0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Tanah Rp.0

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pada TA 2024 mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan tidak ada penambahan belanja modal Tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA .2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.10 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal

Lainnya Rp.0 ***Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023***

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Rek. BRI No. 0029-01-000909 atas nama Bendahara Pengeluaran Dilmil II-11 Yka	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Bukan Pajak Rp.0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TA 2023	TA 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp.0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2024 dan 2023

Jenis	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Bagian Lancar TPA Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang

ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**	**0,00%**	**-**
Bagian Lancar TP/TGR	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	**-**	**0,00%**	**-**
Bagian Lancar TPA	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Belanja Dibayar di Muka Rp.0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2021	TA 2020
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp370.000

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp370.000 dan Rp4.207.100. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	370.000	4.207.100
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	**370.000**	**4.207.100**

Tagihan TP/TGR Rp.0

C.10 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0

C.11 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp.0

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp.0

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	**-**
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2021	**-**

Peralatan dan Mesin Rp0

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**-**

Gedung dan Bangunan Rp0

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**-**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**-**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**-**
Mutasi tambah:	
	-

Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	**-**

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**-**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**-**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Aset Tak Berwujud Rp0

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	**-**
Mutasi tambah:	**-**
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**-**

Aset Lain-Lain Rp0

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	**-**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Akhir	-
Saldo per 31 Desember 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**-**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	-	-	-

Uang Muka dari KPPN Rp.0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun beban barang yang masih harus dibayar berupa beban langganan air. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Pendapatan Diterima Di Muka Rp.0

C.25 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Ekuitas Rp370.000

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp370.000 dan Rp4.207.100. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP Rp.0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	-	-	-
Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	-

Beban Persediaan Rp40.376.898

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp40.376.898 dan Rp41.601.625. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	40.376.898	41.601.625	-3%
Pemeliharaan	-	-	-
Beban penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**40.376.898**	**41.601.625**	**-3%**

Beban Barang dan Jasa Rp13.371.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.371.000 dan Rp9.431.800. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 42 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Bahan	7.141.000	5.665.300	26%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.110.000	3.766.500	36%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0%
Beban Jasa Lainnya	1.120.000	0	0%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0%
Beban Langganan Telepon	0	0	0%
Beban Langganan Air	0	0	0%
Beban Sewa	0	0	0%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0%
Jumlah	**13.371.000**	**9.431.800**	42%

Beban Pemeliharaan Rp0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 66,63 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	0

Beban Perjalanan Dinas Rp51.490.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp51.490.000 dan Rp45.000.000. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 117,77 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	51.490.000	45.000.000	14%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0%
Jumlah	**51.490.000**	**45.000.000**	14%

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan

beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Jumah Penyusutan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Lain-lain Rp.0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN)
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		**-**	**-**

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp.0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	**0**	**-**	**-**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp4.207.100

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.207.100 dan Rp300.000.

Defisit LO Rp(105.237.898)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(105.237.898) dan Rp(96.033.425). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Rp.0

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp.0

E.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Selisi Revaluasi Aset Rp.0

E.6 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.7 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp101.400.798

E.8 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp101.400.798 dan Rp99.940.525. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	92.411.000
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	8.989.798
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**101.400.798**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.8.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp92.411.000, sedangkan DDEL sebesar Rp 0

E.8.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 17.048.725 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Bahan untuk pemeliharaan	Ditjen Badilmiltun MARI	0
Barang konsumsi	Ditjen Badilmiltun MARI	8.989.798
Jumlah		8.989.798

Ekuitas Akhir Rp.370.000

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.370.000 dan Rp.4.207.100.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA 663293

Tgl Data : 22/04/25 8:30 AM
Tgl Cetak : 22/04/25 7:30 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	93,972,000	92,411,000	(1,561,000)	98.34	83,465,000	82,891,800	(573,200)	99.31
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	93,972,000	92,411,000	(1,561,000)	98.34	83,465,000	82,891,800	(573,200)	99.31
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG 005**
ESELON I : **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 05**
SATUAN KERJA : **PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA 663293**

Tgl Data : 22/02/25 8:30 AM
Tgl Cetak : 22/02/25 7:30 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**93,972,000**	**92,411,000**	**(1,561,000)**	**98.34**	**83,465,000**	**82,891,800**	**(573,200)**	**99.31**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Yogyakarta, 22 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087110870

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**	Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I	**: 05**	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**	Tanggal : 22/02/25 7:55 PM
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**	Halaman : 1
SATUAN KERJA	**: 663293**	**PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA**	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**		Tgl Data : 22/02/25 10:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,067,000	5,377,000	5,110,000	0	5,110,000	95.03	267,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7,067,000	5,377,000	5,110,000	0	5,110,000	95.03	267,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	14,020,000	7,780,000	7,141,000	0	7,141,000	91.79	639,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,020,000	7,780,000	7,141,000	0	7,141,000	91.79	639,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,002,000	27,817,000	27,550,000	0	27,550,000	99.04	267,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	18,002,000	27,817,000	27,550,000	0	27,550,000	99.04	267,000
5221	Belanja Jasa							
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,490,000	51,490,000	51,490,000	0	51,490,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,273,000	388,000	0	0	0	0	388,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	53,763,000	51,878,000	51,490,000	0	51,490,000	99.25	388,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	93,972,000	93,972,000	92,411,000	0	92,411,000	98.34	1,561,000
	JUMLAH BELANJA	93,972,000	93,972,000	92,411,000	0	92,411,000	98.34	1,561,000

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/02/25 8:30 AM
Tgl Cetak : 22/02/25 7:30 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	370,000	4,207,100	(3,837,100)	(91.21)
JUMLAH ASET LANCAR	**370,000**	**4,207,100**	**(3,837,100)**	**(91.21)**
JUMLAH ASET	**370,000**	**4,207,100**	**(3,837,100)**	**(91.21)**

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	370,000	4,207,100	(3,837,100)	(91.21)
JUMLAH EKUITAS	**370,000**	**4,207,100**	**(3,837,100)**	**(91.21)**
JUMLAH EKUITAS	**370,000**	**4,207,100**	**(3,837,100)**	**(91.21)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**370,000**	**4,207,100**	**(3,837,100)**	**(91.21)**

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087110870

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/04/25 8:30 AM
Tgl Cetak : 22/04/25 7:29 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	40,376,898	41,601,625	(1,224,727)	(2.944)
Beban Barang dan Jasa	13,371,000	9,431,800	3,939,200	41.765
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	51,490,000	45,000,000	6,490,000	14.422
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/02/25 8:30 AM
Tgl Cetak : 22/02/25 7:29 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	105,237,898	96,033,425	9,204,473	9.585
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(105,237,898)	(96,033,425)	(9,204,473)	9.585
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(105,237,898)	(96,033,425)	(9,204,473)	9.585
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(105,237,898)	(96,033,425)	(9,204,473)	9.585

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087110870

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/02/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 22/02/25 7:29 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,207,100	300,000	3,907,100	1,302.37
SURPLUS/DEFISIT-LO	(105,237,898)	(96,033,425)	(9,204,473)	9.58
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	101,400,798	99,940,525	1,460,273	1.46
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,837,100)	3,907,100	(7,744,200)	(198.21)
EKUITAS AKHIR	370,000	4,207,100	(3,837,100)	(91.21)

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H.

Mayor Chk NRP 2920087110870

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

UNIT ORGANISASI : **(05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

WILAYAH/PROVINSI : **(0400) DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : **(663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA**

Tgl Data : 22/02/25 8:30 AM

Tgl Cetak : 22/02/25 7:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	370,000	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	92,411,000
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,989,798
0.0	391111	Ekuitas	0	4,207,100
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,110,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,141,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,120,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	51,490,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	40,376,898	0
JUMLAH			**105,607,898**	**105,607,898**

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H

Mayor Chk NRP 2920087110870

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

UNIT ORGANISASI : **(05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

WILAYAH/PROVINSI : **(0400) DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : **(663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA**

Tgl Data : 22/02/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 22/02/25 7:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	92,411,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,110,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	7,141,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,550,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,120,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,490,000	0
JUMLAH			**92,411,000**	**92,411,000**

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H.

2920087110870

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : **005** **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : **663293** **PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA**

Tgl Data : 22/02/25 6:25 PM
Tanggal : 22/02/25 7:32 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010302003	Kertas Cover	10,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	360,000
Jumlah Barang Konsumsi		**370,000**
TOTAL		**370,000**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA
KPPN YOGYAKARTA

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 663293
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	93,972,000	93,972,000	0
2	Belanja	92,411,000	92,411,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-25

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Telp. (0274)452220 Fax. (0274) 452254

BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN BULAN JUNI TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
KODE SATKER 005.05.0400.663293.000.KD
Nomor: W2.Mil 04/ 24 /BA-BMN/XII/2024

Pada hari ini SelasaTanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Joko Yuswanto.
   Pangkat/NRP : Serma / 31960119480674
   Jabatan : Ketua

2. Nama : Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., MBA
   NIP : 1982041820110111009
   Jabatan : Sekretaris

3. Nama : Dwi Laksono.
   Pangkat/NRP : Kopka / 31980152021176
   Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan Bulan Desember Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Opname Fisik (*Stock Opname*). Adapun total Nilai Barang per 31 Desember 2024 Meliputi :

a.	Barang Konsumsi	:	370.000,-
b.	Amunisi	:	0,-
c.	Bahan Untuk pemeliharaan	:	0,-
d.	Suku Cadang	:	0,-
e.	Persedaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	:	0,-
f.	Pita ukai dan Legas	:	0,-
g.	Bahan Baku	:	0,-
h.	Barang Dalam Proses / Setengah Jadi	:	0,-
i.	Tanah / Bangunan Untuk Dijual	:	0,-
j.	Hewan dan tanaman untuk dijual	:	0,-
k.	**Total**	:	**370.000,-**

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

1.	Joko Yuswanto.	Ketua
2.	Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., MBA	Sekretaris
3.	Dwi Laksono.	Anggota

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon Staff : (0274) 452220 Fax. (0274) 452254
Email : dilmilyogya@ymail.com Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id

HASIL OPNAME FISIK SEMESTER II 2024

Nama Satker : Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
Kode Satker : 005.05.0400.663293.000 KD
UAPPB-W : Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
UAPPB-E1 : Mahkamah Agung

No.	Nama Barang	Kode Barang		Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
				Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	Kertas Covver	1010302003	000001	20	20	0	√	-	-
2	Refil Toner	1010304004	000007	3	3	0	√	-	-

Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Paija, S.H.
Mayor Chk NRP. 290087110870

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga	: (005) MAHKAMAH AGUNG	Tgl, No. SP	: 28 November 2023 , DIPA-005.05.2.663293/2024
Unit Organisasi	: (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (04.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA	KPPN	: (030) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00016/DRPP/663293/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	2.355.000,00	4.890.000,00	7.245.000,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	2.355.000,00	4.890.000,00	7.245.000,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	2.355.000,00	2.445.000,00	4.800.000,00	0,00
	1. BP UP*)	2.355.000,00	2.445.000,00	4.800.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Palja, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087110870

KOTA YOGYAKARTA, Desember 2024
Bendahara Pengeluaran

NGATINI, S.H.
NIP 197606272006042002

Dicetak pada tanggal,02 Januari 2025

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 651556632931000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00016/DRPP/663293/2024

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara		
A.	Saldo Kas Bendahara		
1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0
B.	Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :		
1	Saldo BP UP	Rp.	0
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0
C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)		
A.	Kas yang dikuasai bendahara		
1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
A.	Pembukuan menurut Bendahara		
1 a.	Saldo UP	Rp.	0
b.	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2 a.	Saldo TUP	Rp.	0
b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3	Saldo Lainnya	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0
B.	Pembukuan menurut UAKPA		
1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0
C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
IV.	Penjelasan atas selisih		
A.	Selisih Kas (II.B)		
B.	Selisih Pembukuan UP (III.C)		

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

NGATINI, S.H.
NIP 197606272006042002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087110870

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA

Satuan Kerja : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA66329300-

No Rekening : 651556632931000

Nama Rekening : BPG 030 DILMIL II-11 YOGYAKARTA 05

Nama Bank : null

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			0,00
04-12-2024	FPK-PENG-htCQUbavalGz0e3	GUP	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
10-12-2024	FPK-PENG-ER0H9NqEBXis6jd	[DARI TUNAI] GUP	0,00	2.445.000,00	0,00
31-12-2024	FPK-PENG-YHzWK80UzIaPjQo	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**2.445.000,00**	**2.445.000,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

NGATINI, S.H.

NIP. 197606272006042002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 663293

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	651556632931000	BPG 030 DILMIL II-11 YOGYAKARTA 05	null	20	S-1829/WPB.12/KP.06/2020	08-07-2020	2024-12-31	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

NGATINI, S.H.

NIP 197606272006042002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2024-12

Sequence LPJ : 00001/LPJ/66329300/12/2024

Kode Satker : 663293

Nama Satker : PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tanggal Kirim : 02/01/2025 10:05

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Yogyakarta (030) dengan timestamp 02/01/2025 11:47 WIB.

Petugas Validator LPJ :
Staf : SURWIDIYATI pada 02/01/2025 11:19.
Kasi : ENDANG ZAINATUN pada 02/01/2025 11:47.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN) (05)
PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA (663293)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILMILT (032901xxxxxx307)
Virtual Account : 651556632931000 | BPG 030 DILMIL II11 YOGYAKARTA 05
Periode : 01-12-2024 s/d 31-12-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-04	10:08:02	36225962	From 032901003295305 to 651556632931000 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 240301301016937000001	0,00	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	SPAN	
2024-12-10	13:18:27	36504978	081802605995	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		2.445.000,00	2.445.000,00			
			Saldo Akhir				0,00		

BRI Virtual Dashboard
Last Update : 02-01-2025 Pukul 08:20:12